

C2

Artikel Dana Rutin
No. Kontrak: 01/RUTIN/VI/2000

**PERLAWANAN TERHADAP KOMUNIS:
Manifes Kebudayaan vs Lembaga Kebudayaan Rakyat
1963-1964**

Oleh : Drs. Wannofri Samry, M. Hum(Ketua)
Novi Yeni(Anggota)
Drs. Maizufri, M.S.(Pembimbing)

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2000

PERLAWANAN TERHADAP KOMUNIS: Manifes Kebudayaan vs Lembaga
Kebudayaan Rakyat 1963-1964

PENDAHULUAN

Tanggal 5 Juli 1959 preseiden Soekarno mengumumkan untuk kembali ke UUD 1945,. Ini menandai mulainya era Demokrasi Terpimpin di Indonesia . Dikit Presiden ini diiringi dengan gagasan Presiden tentang Manifesto Politik (Manipol) yang memuat landasan sistem Demokrasi Terpimpin. Inti dari manifesto itu adalah Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia(Usdek).

Untuk melaksanakan konsep Manipol,¹ Presiden Soekarno melahirkan pula gagasan Nasionalisme, Agama dan konunisme. Walaupun mendapat protes di mana-mana oleh umat beragama, tetapi bagi Presiden Soekarno hal itu diyakini sebagai alat yang mampu untuk mengintegrasikabn kekuatan. Revolusi Indonesia.

Gagasan Manipol, Nasakom dan USDEK(Undang-undang dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia)² yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno itu telah mendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Ternyata Partai Komunis Indonesia (PKI) mendukung, sementara partai-partai Islam ditambah dengan PSI serta tokoh-tokoh Angkatan Darat menolak. Penolakan yang dilakukan oleh partai-partai Islam tidak lain karena pesimisme akan penyatuan Islam dengan komunisme. Sedangkan penolakan oleh kelompok politik lain itu karena persaingan politik dengan PKI, yang masa itu kian dekat saja dengan kekuasaan. Ini menekan kelompok politik lain. Kelompok yang menolak itu secara realitasnya orang-orang beragama yang anti atheis.

Dalam perkembangan politik tahun 1960-an itu, satu hal yang sering dilupakan untuk dikaji adalah keberadaan para

¹ Departemen Penerangan R.I, Manifesto Politik R.I. 17 Agustus 1959. Dep. RI, 1959. Pidato Soekarno itu dimuat juga dalam Soekarno. Di Bawah Bendera revolusi, Jilid II. Jakarta: Panitia Penerbit, 1964.

² Menurut Soekarno USDEK adalah satu pola untuk mencapai kepribadian Indonesia. Pritono, Penetapan Bahan-bahan Indokrinasi. Djakarta: Dua R, 1959 Hal. 1964.

budayawan (pengarang, seniman). Keberadaan kelompok budayawan itu setidaknya bisa dibaca lewat dua kelompok besar, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang di bawah PKI dan Manifest Kebudayaan yang menentang politik PKI. Kelompok pertama tokohnya antara lain Pramoedya Ananta Toer, Sobron Aidit (adiknya Aidit), HR Bandaharo, dan Sitor Situmorang (LKN, pendukung Lekra). Tokoh Manifest Kebudayaan antara lain H.B. Jassin, Wirtamo Soekito, Arif Budiman, Goenawan Mohammad dan Taufiq Ismail. Dua kelompok ini berseteru dalam tataran ideologi di bawah tarik-tarikan kekuasaan yang sedang melingkupi mereka.

Lekra adalah sebuah organisasi kebudayaan yang didirikan oleh tokoh-tokoh partai Komunis Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Dalam deklarasinya organisasi kebudayaan itu menganut paham realisme sosialis atau humanisme proletariat.³ Ini merupakan tiruan dari paham realisme sosialis yang diterapkan oleh para seniman Uni Soviet. Ketika negeri itu masih diperintah Stalin, maksudnya adalah untuk menempatkan kebudayaan di bawah politik untuk mengembangkan komunisme.

Manifest Kebudayaan menganut paham Humanisme Universal, yang merupakan rumusan dari hasil diskusi bersama⁴. Istilah itu sendiri tidak disukai Soekarno, karena pernah digunakan oleh Syahrir dalam politiknya. Bagi Soekarno dan PKI paham yang diyakini kelompok Manifest Kebudayaan adalah menghambat revolusi Indonesia yang dicanangkan Soekarno. Baik Soekarno dan PKI "menghantam" bahkan berusaha memusnahkan paham tersebut beserta orang-orangnya.

Politisasi kebudayaan itu telah mendorong Jassin dan kawan-kawannya, ditambah dengan penulis-penulis muda yang sering menulis di majalah Sastra pimpinan Jassin untuk mendeklarasikan sebuah manifest kebudayaan, yang kemudian dikenal dengan Manikebu.

³ *Mukadimah Lekra, Yahya Ismail, Pertumbuhan, Perkembangan dan kejatuhan lekra di Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972, 1972. Hal 49-63.

⁴ Pemikiran inti Humanisme Universal itu sebenarnya sudah ada dalam Surat Kepercayaan Gelanggang, tetapi kata itu baru ditulis Jassin dalam buku Gema Tanah Air. Wirtamo sendiri memaksudkan sebagai Budi Nurani Universal. Lihat, Wirtamo Soekito, "Konspirasi dengan Jassin" dalam Sajpardo Djoko Damono, Ibid. hal. 21. Juga Wannofii Samry, Manifest Kebudayaan, Sebuah Protes Terhadap Lekra masa Demokrasi Terpimpin. Skripsi, S1 Jurusan sejarah Fak. Sastra Universitas Andalas Padang.

Deklarasi itu berlangsung tanggal 17 Agustus 1963 di Jakarta. Manifes itu mendapatkan sambutan dari beberapa budayawan baik yang tinggal di Jakarta maupun di luar Jakarta. Beberapa dukungan dimuat di majalah Sastra. Sebaliknya manifes yang baru itu bersama pendukungnya mendapat kecaman, teror dan tindakan kekerasan dari Lekra dan Soekarno secara terang-terangan. Periode berikutnya diikuti oleh serentetan panjang polemik, teror dan tindakan kekerasan antara mereka sampai gagalnya pemberontakan Komunis di Indonesia tahun 30 September 1965.

Beberapa literatur yang membantu penulis dalam studi awalnya adalah karya Yahya Ismail, *Pertumbuhan, Perkembangan dan kejatuhan Lekra di Indonesia*. Ini merupakan karya ilmiah seorang sarjana S1 di Malaysia, penekanan-penekannya lebih banyak pada karya-karya sastra yang muncul ketika itu. Kemudian tulisan Ajip Rosidi, *Sejarah Kesusastraan Indonesia*. Manifes Kebudayaan dalam buku ini ditempatkan dalam bab yang singkat dalam rangka melihat sejarah kesusastraan Indonesia. Kemudian karya Soegiarso Soeorojo, *Stapa Menahur Angin Menuai Badai*. Ini merupakan karya populer, sejenis kenangan seorang pelaku sejarah.

Berdasarkan itulah penulis menulis sebuah penelitian mengenai sejarah orang-orang sastra dan budaya yang terlibat dalam huru-hara tahun 1960-an dari pendekatan politik.

Batasan batasan temporal penelitian ini adalah tahun 1963-1964. Tahun 1963 adalah tahun dideklarasikannya Manifes Kebudayaan, yang tahun berikutnya meningkatkan intensitas polemik, perlawanan dan teror antara mereka dan Lekra. Tahun 1964 merupakan tahun dilarangnya manifes Kebudayaan oleh Presiden Soekarno, yang juga prolog terhadap gerakan komunis 30 September 1965.

Pertanyaan yang ingin diajukan adalah: Bagaimanakah setting politik tahun 1960-an? Di manakah posisi para budayawan dalam kondisi politik itu? Apakah yang diinginkan budayawan (Lekra dan Manikebu) dalam kondisi seperti itu? Bagaimanakah mereka memainkan peran mereka dalam kondisi tersebut? Bagaimanakah persetujuan politik antara Lekra dan Manikebu? Bagaimanakah kondisi setelah dilarangnya manikebu dan setelah gagalnya PKI dalam pemberontakan tahun 1965?

Kerangka Teoritis

Jadi pendekatan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan politik, terutama pendekatan tingkah laku politik. Maksudnya adalah memperhatikan perilaku politik atau tingkah laku politik (*political behavior*). Maka sasaran adalah pikiran, tindakan manusia yang berkaitan dengan proses politik dan kebijakan terhadap proses itu. Perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan tindakan-tindakan yang nampak (termasuk gerakan protes, lobi, ...) Bagaimanapun kreativitas budaya dan tindakan para budayawan masa itu tidak terlepas dari kondisi politik yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin. Dalam konteks sosial demikian, budayawan telah terseret dan ikut dalam arus politik yang terjadi.

Untuk penelitian ini penulis telah mencoba mempelajari koran-koran sezaman yang didapatkan di PDS H.B. Jassin. Serta meneliti kembali beberapa tulisan dan peninggalan dari pelaku yang sering menulis dalam tahun tersebut. Wawancara sempat penulis lakukan dengan Bapak H.B. Jassin dan Wiratmo Soekito dan Taufiq Ismail. Kemudian penulis juga mendapatkan bahan-bahan tulisan dari pusat Litbang majalah Tempo. Media pers yang sempat penulis baca antara lain *Bintang Timur*, *Harian Rakyat*, *Warta Bakti* dan majalah *Sastra*

Sistem Politik dan Budayawan Demokrasi Terpimpin

A. Sistem Politik Indonesia

Sepanjang masa Demokrasi Liberal negara Indonesia telah mengalami iklim politik yang tidak stabil. Percekcokan antara golongan dan pemimpin sering terjadi. Misalnya adanya pertikaian pendapat antara M. Hatta dengan Soekarno. Di satu pihak Hatta berpendapat bahwa revolusi telah selesai, sedangkan Soekarno mengatakan bahwa revolusi Indonesia belum selesai⁵. Masa ini jatuh bangunnya kabinet. Peristiwa Pemerintahan Rakyat Semesta (Permesta), DI/TII dan lain-lainnya itu menunjukkan ketidakstabilan politik dan negara.

⁵ M.Hatta, *Demokrasi Kita*, Jakarta: Bulan Bintang 1969

Mengingat perkembangan politik yang ada, terutama sekitar akhir 1958 dan awal 1959, Presiden Soekarno mengajukan usul kepada konstituante untuk kembali ke UUD 1945. Tetapi setelah konstituante mengadakan beberapa kali sidang, konstituante tidak mengambil kata sepakat. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengambil inisiatif untuk mengumumkan sebuah dekrit untuk kembali ke UUD 1945⁶

Dekrit itu diikuti oleh pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang merupakan penjelasan dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Hal itu menandai mulainya masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia, yaitu sistem demokrasi yang menghendaki agar kekuasaan terpusat pada satu orang. Presiden menginginkan suatu masyarakat sosialis Indonesia.

Penemuan kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung sebagai Garis-garis Besar Haluan negara (Manipol). Menurut Soekarno Demokrasi ala barat tidak cocok dengan Indonesia. Demokrasi Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi terpimpin merupakan jawaban yang menurut Soekarno sangat tepat.

Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 sebenarnya jalan pembuka untuk sistem otoriter di Indonesia. Dekrit yang secara tertulis kembali ke UUD 1945 itu hanya memberi kesempatan kepada Presiden sendiri untuk menjalankan politik tangan besinya. Segalanya terpusat. Kemudian konsepnya berupa Manipol USDEK dan Nasakom adalah memberikan kesempatan kepada komunisme untuk berkembang, sekaligus menghidupkan kembali berbagai tindakan kekerasan di berbagai tempat dan di berbagai level. Demokrasi yang bernama Demokrasi Terpimpin hanyalah demokrasi yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitas sosial, budaya, politik dan ekonomi. Segalanya menjadi terpusat dan menurut kemauan politik Soekarno. Karena itu siapapun yang tidak mendukung Soekarno menjadi terancam dan tidak mendapat tempat. Mereka yang menjadi oposisi atau tidak turut dalam akselerasi politik

⁶Soekarno, "Penemuan Kembali revolusi Kita", Pritomo, Ibid. hal. 35-37.

pimpinan akan mendapat cacian di pers. Pers, buku dan apapun bentuk karya mereka akan dilarang. Namun PKI mendapat tempat dalam politik Soekarno, sebab PKI mendukung konsep-konsep politik Soekarno yang menganut marxisme. Bagi Marxis satu-satunya jalan untuk perubahan adalah revolusi dan merebut kekuasaan dari kelompok borjuis dengan menggerakkan kelas proletariat. Dengan cara itu masyarakat sejahtera menurut marxisme, yaitu masyarakat tanpa kelas, akan tercapai. Kapitalis dan imperialisme dan apa saja yang datanginya dari dunia Barat yang liberal harus ditumpas dan dihancurkan.

Bagi Presiden Soekarno, yang harus ditinggalkan segera adalah masalah dualisme yang terdapat dalam masyarakat Indonesia;⁷ dualisme antara masyarakat adil makmur dan masyarakat kapitalis, dualisme antara revolusi belum selesai dan revolusi telah selesai, dualisme antara demokrasi untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi. Hal semacam itu telah menjadi momok dalam perjuangan masyarakat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Tetapi kebijaksanaan dan gagasan yang telah dikemukakan oleh Presiden Soekarno masa Demokrasi terpimpin mendapat berbagai rintangan dalam mewujudkannya. Terutama gagasan Nasakom menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Masalah itu mengacaukan kehidupan sosial politik.

Hal yang penting dan berpengaruh besar dalam masa awal Demokrasi terpimpin adalah masalah Penyederhanaan. Semua partai politik diarahkan agar mendukung gagasan yang dicetuskan Soekarno. Sedangkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dinyatakan terlarang. Karena beberapa tokohnya dinyatakan terlarang dalam berbagai peristiwa yang menentang pemerintah pusat. Bagi Todiruan Dydo kebijakan seperti itu dianggap sebagai usaha pemandulan partai-partai politik, yang yang secara langsung langsung memudahkan arah kekuasaan ke satu tangan pimpinan.⁸ Hal yang hampir senada juga dikatakan oleh Herbert Feith, bahwa pada awal masa Demokrasi Terpimpin peranan partai terasa kecil karena tekanan dari pemerintah, tetapi kemudian kembali menegang setelah tahun 1963. Hal itu

⁷ Ibid

⁸ Todiruan Dydo, *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G. 30 S PKI*. Jakarta: Golden Terayon Press, 1990. Hal. 67-68.

dikatakan sebagai akibat land reform dan kepribadian atas perkembangan partai Komunis Indonesia.⁹ Tentu, perkembangan dan semakin berpengaruhnya komunis di Indonesia menjadi suatu hal yang meragukan bagi pemimpin maupun masyarakat Indonesia. Seperti yang ditulis oleh Donald Wilhem bahwa pada masa ini Partai Komunis Indonesia merupakan partai terbesar di dunia non-komunis, yaitu 3 juta anggota(resmi—Pen), tambah 17 juta pengikut yang bergabung dengan organisasi “mantel”nya.¹⁰ Kemudian pengindokrinasian dari gagasan Presiden Soekarno yang mengandung ajaran Nasakom, yang diberikan di berbagai lembaga, adalah suatu gejala semakin cerah perkembangan partai tersebut. Pengaruh komunisme dalam zaman Demokrasi Terpimpin menjadi sorotan yang penting. Karena pada masa itu tampak bahwa komunis memberikan corak lain bagi perkembangan sejarah Indonesia. Dalam arti kata, pada masa itu komunis begitu banyak memberika kontra ke berbagai golongan dan sektor; baik ideologi, politik, kebudayaan dan sebagainya.

Presiden sendiri tampak memberikan perlindungan kepada golongan komunis. Umpamanya dalam pertentangan antara Angkatan Darat yang dipimpin A.H. Nasution melawan PKI, maka Presiden Soekarno sering memberi belaan kepada PKI.¹¹ Buktinya, setelah masa coup yang dilakukan PKI pada tangga 30 September 1965, Presiden Soekarno tidak pernah mengecam PKI.¹² Melihat keadaan seperti seperti itu Herbert Feith menuli banyak orang telah berpikir bahwa negara Indonesia telah bergerak ke arah PKI.¹³

Dengan mendapat anginnya komunis dalam struktur pemerintahan Demokrasi terpimpin itu, kondisi politik tampak makin menegang. Sebab realitas penduduk Indonesia yang beragama tidak menyukai ideologi atheis di Indonesia. Ketegangan politik maki menguat dengan makin besarnya kepercayaan dan peluang yang

⁹ Herbert Feith & Lance Castle(Ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988. Hal. 50.

¹⁰ Donald Wilhem, *Indonesia Bangkit*(Terj. Suli Suleiman). Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1980. Hal. 42

¹¹ Mochtar Lubis, *Hati Nurani Melawan Kezaliman*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988. Hal. 64-67.

¹² Herebert Feith, “Wawancara Aswab Mahasin,” *Prisma*, 7 Agustus 1978.

¹³ Edward C. Smith, *Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers, 1986. Hal. 67.

diberikan oleh Presiden Soekarno ke PKI. Pelarangan pemerintah terhadap Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (1960), sebagai dua partai yang paling kritis terhadap pemerintah dan dituduh terlibat dalam berbagai pemberontakan, melicinkan jalan PKI untuk berhegemoni dalam politik. Sebab dua partai itu adalah dua kekuatan yang menjadi saingan politiknya. Namun pelarangan itu bukan berarti konflik selesai, justru makin menegang. Orang-orang Masyumi dan PSI serta beberapa intelektual yang tidak menyukai kebijakan Soekarno bergerilya menentang berbagai kebijakan.

Ada tiga kekuatan utama yang berpengaruh pada Demokrasi Terpimpin, yaitu: Soekarno, PKI dan Angkatan Darat. Dari ketiga kekuatan itu, Soekarno masih mendominasi seluruh kekuatan.¹⁴ PKI baru mulai muncul dengan baik setelah Presiden Soekarno merelaisasikan sistem demokrasi terpimpin, terutama dengan adanya konsep nasakom. Penyempitan ruang gerak parta-partai, menghilangkan hak legal kekuatan Masyumi dan PSI, juga telah memberi angin bagi perkembangan PKI.

Budaya Politik dan Budayawan dalam Demokrasi Terpimpin

Mengenai Revolusi yang belum selesai sebagai konsep Bung Karno mengenai kondisi politik Indonesia, mendapat tantangan keras terutama oleh Wakil Presiden RI, M. Hatta. Dengan buku *Demokrasi Kita* (1960) ia menentang sikap Bung Karno itu. Pendapat itu bagi Hatta tidak akan menyelesaikan masalah Indonesia yang sedang dalam perubahan politik. Soekarno justru berkeras hati untuk memformulkannya dengan Manipol-Usdek-Nasakom. Walaupun konsep itu ditentang oleh kalangan beragama, terutama umat Islam, namun Soekarno tampak tidak mempedulikan tuntutan itu. Bagi Islam itu justru jadi bumerang, karena konsep tersebut akan memberi tempat yang subur kepada komunis yang jelas-jelas atheis dan bertentangan dengan Islam. Justru agama disebutkan sebagai candu.

Posisi para budayawan juga terbagi setidaknya ke dalam dua bagian yang besar. Sebahagian, ikut dalam barisan Partai politik dan

¹⁴ Dydo, *op.cit.* hal. 67

sebahagian mengatakan diri mereka tidak berafiliasi ke suatu partai apapun. Ini berbeda dengan masa liberal di mana budayawan berusaha mengatur jartak dengan partai politik. Bagi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berada di bawah naungan PKI secara tegas dikatakan bahwa "politik adalah panglima. Ini ditegaskan sejak kongresnya di Solo tahun 1959."¹⁵

Masa setelah tahun 1959, tampak karya-karya Lekra yang sengaja diciptakan untuk kepentingan partai komunis dan ideologi. Umpamanya Sitor Sitomorang, yang sebelumnya mempunyai karya-karya yang sejuk, berestetika tinggi tetapi setelah ia kembali dari negeri Cina karyanya menampakkan warna komunis. Ini bisa dilihat karya yang berjudul "Makan Roti Komune".¹⁶ Judul ini tampak menunjukkan kekagumannya terhadap komunis. Dalam karya Pramoedya Ananta Toer, seperti dalam gadis Pantai juga kelihatan pengaruh komu is tersebut. Pendapat Pramoedya bahwa yang harus dikembangkan dalam kritik di alam Manipol haruslah berbasis politik.¹⁷ Di sini kelihatan bahwa bagi Pramoedya, hanya karya sastra yang menyuarakan politik Soekarno yang bisa diterima. Artinya sastra dikorbankan demi politik, dan sastrawannya mengabdikan pada kekuasaan.

Mulai aktifnya budayawan komunis dalam kegiatan politik dengan mengorbankan kesusastraan karena ia dijadikan sebagai alat komunikasi politik dan kebutuhan partai tentu menjadikan sastra tidak lagi sebagai pencarian kebenaran dan estetika. Karena kebenaran itu sudah ditempatkan di bawah kebenaran politik yang culas.

Sikap itu juga mendatangkan reaksi dari budayawan dari luar Lekra. Reaksi itu bukan karena Lekra mempunyai aliaran yang berbeda tetapi adalah karena jargon poolitik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh lekra pada ssuatu sisi juga memojokkan dan mengadu domba antara politik(kekuasaan) dengan para budayawan). Iklim itu secara kreatifitas jelas tidak menguntungkan, dan pada sisi lain memvbuat lawan-lawan komunis ketakutan. Reaksi H.B. Jassin dan sastrawan yang sering menulis di majalah Sastra dengan mengumumkan Manifes Kebudayaan

¹⁵ Keith Foulcher, *Social Commitment in Literature and The Arts The Indonesia " Institute of People's Culture 1950-1965*. Victoria: Monash CSSM University, hal. 135.

¹⁶ Yahya ismail, *op.cit.* hal. 35

¹⁷ Yahya ismail, *Ibid.* hal. 20

. Manifes itu merupakan penegasan akan kertagu-raguan dan ketakutan yang mungkin mengancam, sekaligus merupakan penegasan akan jalan kreativitas yng mereka pilih.

Sebenarnya pertentangan budayawan komunis dan non komunis telah ada semenjak tahun 1950-an, semenjak lahirnya orghanisasi Lekra.¹⁸ Pertentangan itu tetap berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Antara tahun 1950-1958, pertentang di kalangan para budayawan tidak begitu kedengaran., walaupun ada polemik antara orang-orang Lekra dan Wiratmo Soekito.¹⁹ Polemik itu masih bisa dilihat dalam kewajaran. Waktu itu Soekarno memang belum mengeluarkan jarghon seperti Manipol dan Nasakom, yang kemudian menjadi energi bagi Lekra. Namun sejak Demokrasi Terpimpin mulai ditetapkan oleh Presiden Soekarno, komunis merespon gagasan itu dengan antusias. Karena gagasan itu secara politis menguntungkan. Lekra kini menjadi alata agitasi . Agitasi itu didukung pula oleh Lembaga kebudayaan nasioanal(LKN) yang dipimpin oleh Sitor Situmorang. Tahun 1960-an "Serangan-serangan" terjadi di beberapa media . Terutama antara Bintang Timocr, Harian Rakyat dengan majalah Sastra pimpinan H.B. Jassin. Lekra menyerang dengan jargon-jargon marxis dan revolusi dan menyudutkan Sastra dengan antek-antek imperialis dan kolonialis. Itu artinya adalah anti Soekarno dan keusaannya.²⁰

Pertentangan semakin menegang semenjak tahun 1962, setelah majalah Sastra pimpinnan H.B. Jassin mengumumkan nama-nama peraih hadiah "Sastra". Sebahagian nama yang diumumkan sebagai peraih hadiah sastra Sastra Award menolak, dan meuduh H.B. Jassin tidak adil menilai. Virga belan(LKN) menolak hadiah dalam bidang cerpen bersama Motinggo Busye dan Poppy Hutaggalaung menolak dalam bidang Puisi.

Peristiwa demikian dijadikan preseden oleh Lekra untuk memojokkan H.B. Jassin dan kawan-kawannya. Harian Bintang Timur menyiarkan surat palsu tentang penolakan Usama(peraih hadiah cerita bersambung), sedangkan usama sendiri yang kemudian mengirimkan

¹⁸ Keith Foulcher, op cit: hal 8-26.

¹⁹ Wiratmo Soekito, wawancara. Tanggal 16 desember 1990.

²⁰ Ari Indra, "Situasi Kebudayaan Selama dan Sesudah Diktatur Lekra" Pelopor Baru tgl. 4/4/1966

bersambung), sedangkan usama sendiri yang kemudian mengirimkan surat kepada sastra tidak pernah menolak hadiah sastra itu. Tanggapan Usama dalam kasus itu bahwa Bintang Timur di bawah Pramoedya Ananta Toer berusaha mengadu dombanya dengan H.B.Jassin.²¹ Setidaknya hal tersebut berusaha merangkul Usama ke dalam Lekra atau menurunkan prestise H.B. Jassin sebagai kritikus terkemuka pada masa itu.

Tahun 1962 komunis juga menyerang pengarang Islam, HAMKA dengan sebutan plagiator. Karya hamka yang berjudul "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk merupakan ciplakan dari pengarang Mesir, Manfaluti."²² Ini merupakan usaha komunis untuk menjatuhkan nama baik Hamka serta merusak citra hamka di tengah masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung juga menghina partai Masyumi dan umat Islam sebagai lawan politik komunis.

Tahun 1963-1964 teror-teror Lekra memuncak bersama simpatisannya yang bergabung dalam LKN. Ini erat hubungannya dengan diumumkannya Manifest Kebudayaan, yang dirumuskan oleh sejumlah budayawan yang kebetulan tidak mau berafiliasi dengan partai politik. Pengumuman Manifest Kebudayaan tersebut semakin memperjelas gap antara budayawan, sehingga pertentangan antara komunis dan non komunis semakin menampakkan bentuknya di media massa dan di berbagai peretmuan umum.²³ Menurut Wiratmo Soekito, tahu-tahun setelah pelarangan Manifest Kebudayaan pada tanggal 8 Mei 1964, masalah kebudayaan telah diambil alih oleh kaum politician atau oleh kaum profesional cultural.²⁴ Artinya kemerdekaan kreativitas budaya tertekan oleh kegiatan politik.

Budayawan yang mempunyai gerak yang longgar adalah mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan revolusi Indonesia, terutama mereka yang bernaung di bawah salah satu partai politik.

²¹ Duta Masyarakat... Maret 1963

²² Yahya Ismail, *op.cit.* hal. 41

²³ Yahya Ismail, *op.cit.* hal 41

²⁴ Wiratmo Soekito, "Perjuangan Kebudayaan Kita", dalam DKJ-TIM, Seminar 25 Tahun manifest Kebudayaan menjelang Satu Masa depan Kebudayaan Nasional. Jakarta: DKJ-TIM, 1988. Hal 1-2

Lekra dan Pers

Dalam mengkaji perkembangan politik Demokrasi Terpimpin tidaklah mungkin melepaskannya dari perkembangan pers komunis. Lembaga Kebudayaan rakyat (Lekra) sebagai bahagian dari organisasi PKI menjadi lembaga kebudayaan yang memanfaatkan pers sebagai agitasi politiki. Lekra yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1950 tidak diperkirakan sebagai organisasi kaum komunis g penuh dengan agitasi. Organisasi Kebudayaan itu, yang menekankan perjuangan mereka pada kebudayaan rakyat dengan politik sebagai panglima. Dalam Mukadimah Lekra disebutkan bahwa:

“Lekra bekerja membantu pergulatan-pergulatan untuk kemerdekaan tanah air dan untuk perdamaian di antara bangsa-bangsa, di mana terdapat kebebasan bagi perkembangan berjuta rakyat.”²⁵

Mulanya Lekra memang tidak menyatakan bahwa ia bahagian dari Partai Komunis Indonesia, walaupun konsep-konsep yang digunakan sudah marxisme. Penegasan itu baru dilakukannya oleh Lekra setelah dimualinya demokrasi terpimpin than 1959. Seperti yang disampaikan oleh D.N. Aidit ketika pembukaaan konperensi Sastrawan Sosialis Revolusioner (KSSR) yang juga dihadiri oleh Bung Karno. Di sana dikatakan bahwa PKI telah lama meletakkan sendi-sendi nya di bidang sastra dan seni. Dalam acara itu juga diungkapkan sebuah ungkapan Lekra, bahwa seni untuk rakyat. Atau seni untuk revousi.²⁶ Ungkapan ini perlu dipahami untuk memahami apa pun yang dilakukan Lekra. Dari sini dapat dilihat bahwa Lekra sudah menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia. Suatu hal yang membawa Lekra ke jalur politik adalah slogannya yang mengatakan bahwa politik adalah panglima. Artinya politik mendapat tempat di atas segala hal. Seni saatra dan berbagai kereativitas lainnya berada di bawah kegiatan politi. Jadinya seni untuk politik. Karena politik yang dimaksud di sana adalah kegiatan untuk kekuasaan, maka seni juga dalam usaha untuk memuluskan kekuasaan atau mengokohkan kekuasaan. Sejak tahun

²⁵ Mukhadimah Lekra dalam Yahya Ismail, *op.cit.* 121-123

²⁶ *Ibid.*, *Ibid.* hal. 14

1960 itu jadilah lekra yang memainkan politik komunis, yang berusaha menegakkan sebuah rezim yang menjurus ke otoriter.

Bagi Lekra metode kegiatan mereka adalah turun ke bawah. Prinsipnya adalah azas dua tinggi; meluas dan meninggi, yaitu tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi dan revolusioner. Lekra juga mengungkapkan perlunya kreativitas individual dan kearifan, realisme sosialis dan romantik revolusioner.²⁷ Namun kreativitas individu itu niscaya di bawah politik yang panglima.

Sebenarnya yang dimaksud Lekra agar para budayawan berkreativitas dengan ideologi Marxis. Guna untuk mencapai masyarakat sosialis yang dicitacitakan maka budayawan haruslah memihak ke rakyat kecil. Rakyat kecil dalam pandangan Lekra selalu dipertentangan dengan kelas atas, seperti halnya juga dengan borjuis dan kapitalis-imperialis.

Bagi Pramoedya Ananta Toer Maipol telah memberikan sumbangan terhadap perkembangan revolusi kebudayaan kala itu. Konsep itu, Manifesto itu, katanya telah memberikan kesadaran politik yang tinggi dan kesadaran sosial massa rakyat progresif.²⁸ menurut Adnan Basalamah, sastra memang untuk mengabdikan kepada revolusi.²⁹

Maka jelaslah bahwa Lekra menempatkan kegiatan kebudayaan termasuk Lekra itu sebagai alat revolusi. Ini merupakan pandangan kaum marxis, di mana segalanya dia arahkan untuk revolusi.

Pers dalam tahun 1960-an sudah menjadi alat propaganda politik dan sebagai alat pertengkaran. Bukan dialog yang sehat yang terjadi dalam media pers, tetapi carut-marut politik tanpa mengindahkan etika. Bagi Lekra yang betul hanya satu realisme sosialis dan revolusi yang digerakkan berdasarkan konsep Bung karno untuk menuju masyarakat sosialis. Siapa yang di luar itu adalah keblinger, amnto revolusi dsb. Koran Bintang Timur, Harian Rakyat merupakan koran utama Lekra. Hampir setiap terbit dua koran itu mengemukakan isu-isu yang

²⁷ Keith Foulcher, *op.cit.* hal 110-111

²⁸ Pramoedya Ananta Toer, "Revolusi Kebudayaan Kita" dalam Bintang Timur no. 17 Tahun III tanggal 14 Juni 1964

²⁹ Adnan Basalamah, "Tentang Sastra Revolusioner", dalam Bintang Timur. Th. III tanggal 24 Mei 1964.

kesannya menyerang, termasuk lembaran kebudayaan Lentera yang diasuh oleh Pramoedya Ananta Toer. Kupasan koran-koran itu serig menyatakan batasan antara revolusioner dan anti revolusioner. Kemudian juga ditegaskan batasan kebudayaan Barat dan batasan kebudayaan Timur, mana yang proletar dan mana yang borjuis, kapitalis dan imperialis.

H.B. Jassin dan sastrawan yang sering menulis di majalah Sastra sering disebut tidak revolusioner, karena sering mengutip pemikiran Barat, tidak mau menerima Manipol sebagai haluan negara, tidak mau menerima realisme sosialis-marxis.

Pada masa tahun 1963 sampai *coup d'tat* PKI 1965, pers tidak bisa lagi dikatakan sebagai sarana informasi yang sehat, karena lembaga pers lebih banyak diterbitkan untuk kepentingan politik. Terutama akan terlihat dalam koran-koran yang dikelola orang-orang komunis. Lembaga pers yang dikelola kaum komunis menunjukkan sikap yang berat sebelah ke pemerintahan yang sedang berkuasa yaitu Soekarno. Sementara itu bidang-bidang komunikasi yang penting juga dikuasai, seperti PIA (Pers Biro Indonesia).³⁰ Setidaknya ruang pers untuk kreativitas kebudayaan di berbagai media telah dijadikan tempat "buang ingus politik", yang tensitas politiknya terasa tinggi. Lembaran kebudayaan yang ada di Bintang Timur, Harian Rakyat dan earta Bhakti menjadi ramai oleh slogan.

Menurut Edwar C. Smith, pada tahun 1963 perkembangan pers adalah ke arah komunis sampai ke runtuh tahun 1965³¹. Sedangkan menurut Sutan Takdir Alisjahbana, selama beberapa tahun terakhir zaman Soekarno, pers pada dasarnya sudah dikontrol pemerintah dan semua harapan bagi kebebasan pers sama sekali lenyap.³² Maka dapat dipahami bahwa dalam tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin adalah pers yang membenarka gagasa pemerintah dan revolusi Indonesia. Sehingga dunia pers hampir dikuasai oleh PKI, karena PKI-

³⁰ Soebagio I N., Adinegoro Pelepor Jurnalistik Indonesia Jakarta: CV. H. Mas Agung, 1987. Hal 204-210.

³¹ Edwar C. Smith, op Cit. Hal 202.

³² Ibid. 243

lah yang mau mendukung Soekarno secara gigih saat itu. Sebagaimana juga kegiatan seluruh pers PKI, suatu alasan mengapa Lekra begitu berani pada masa tersebut adaah begitu dekatnya hubuingannya dengan Presiden Soekarno.

Sejauh sumber yang ditemukan bahwa pers budaya yang dikelola oleh orang-orang Lekra pada tahun 1964 adalah pers yang tidak terikat pada "moral". Maksudnya pers tidak berkesan untuk mencerdaskan dan membudayakan publiknya. Pers terasa kurang sopan dan malah terasa jorok, muatannya lebih sarat dengan rasa sakit hati karena adanya perbedaan garis ideologi. Banyak media menampung banyak teriakan seperti; ritul manikebuis, ganyang manikebu, anti revolusi, antek-antek kolonialis dan imperialis, anjlokkan Sumantri Brigjen!... Karena itu pers tidak lebih dari teriakan ketakutan-ketakutan akan ompetitor mereka. Sedangkan Presiden tidak bisa lagi menengahi anak bangsa yang berkonflik itu. Maka secara politis kekuasaan Presdien mulai diintervensi oleh kaum komunis. Sementara bagi Lekra, anggotanya sebenarnya sudah meninggalkan kreativitas budaya dan intelektual, kini mereka memasuki arena politik dengan ideologi marxisnya.

KESIMPULAN

Sejak tahun 1950-an tampak terjadi pertentangan isme dalam kepengarangan dan kaum intelektual Indonesia. Namun pertentangan itu, pada tahap berikutnya dipertajam oleh kekuasaan dan paham politik. Perbedaan isme yang terjadi dalam sejarah Indonesia sebenarnya justru menjadi penting dalam mewujudkan keindonesiaan. Seperti apa yang terjadi tahun 1930-an, terjadi dialog antara Sutan Takdir Alisjahbana, Armen Pane, dan beberapa budayawan lainnya. Begitu 15 tahun kemudian terjadi pula pernyataan yang dimuat dalam Surat Kepercayaan Gelanggang. Di sana didiskusikan kemana arah bangsa Indonesia akan dibawa, dan bangsa yang seperti apa yang harus dibangun di Indonesia? Ini berarti pencetusan kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya tergesa-gesa dilengkapi dengan dialog-dialog kaum intelektualnya. Perbedaan pendapat itu tidak membawa konflik, teror dan kekerasan. Lain yang terjadi setelah tahun 1950-an, para pengarang secara berangsur-angsur ditarik ke dalam kubu-kubu kekuasaan politik.

Setidaknya ada empat kubu politik yang saling menarik; kubu Soekarno, PKI dan Angkatan Darat dan Islam. Kemudian pengarang sendiri terbagi ke dalam kubu itu. Namun kekuatan itu bisa disederhanakan dengan dua; PKI-Soekarno dan kubu Angkatan Darat Islam. Sementara kaum intelektual-pengarang(budayawan) terbagi ke dalam Lembaga kebudayaan Rakyat(PKI-Soekarno) dan Manifestan Kebudayaan sebagai penentangannya atau oposisi kekuasaan.

Hal yang tidak dapat dielakkan dari pertentangan itu adalah terbawanya para pengarang ke dalam caci maki, teror dan kekerasan. Pertentangan itu mereda setelah PKI kalah secara politis setelah G 30 S PKI. Tetapi kekalahan PKI-Soekarno bukan berarti memenangkan pengarang yang di luar kubu tersebut, mereka tetap kalah dan kekuasaan di pegang oleh Angkatan Darat.